

Portofolio Akuntansi Sektor Publik

Anggota Kelompok 8 :

1. Yesi Novia Pitriani 2313031006
2. Aulya Syifa Zulkarnaen 2313031009

ANALISIS ARTIKEL & JURNAL

Artikel 1

1. Judul Artikel : Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Pelaporan Keuangan Sektor Publik (Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih 2022).
2. Analisis :

Artikel ini membahas mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Pelaporan Keuangan Sektor Publik pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih tahun 2022. Akuntansi sektor publik berbasis akrual dinilai sebagai sistem yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan dibandingkan basis kas, karena mencatat transaksi pada saat terjadi sehingga lebih menggambarkan kondisi riil organisasi publik. Regulasi pemerintah seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan UU No. 17 Tahun 2003 menjadi dasar penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik, termasuk pada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Dalam artikel ini, sistem akrual memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, karena setiap pendapatan dan biaya dicatat tepat saat terjadinya, sehingga laporan keuangan lebih akurat dan terpercaya. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya jumlah donasi, yang terlihat dari peningkatan penerimaan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

Selain memberikan manfaat transparansi, akuntansi berbasis akrual juga memperkuat efisiensi dan pengawasan internal di Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Pencatatan real-time melalui perangkat lunak akuntansi mengurangi proses manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan, atau manipulasi data, sehingga pelaporan menjadi lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini juga memudahkan identifikasi dini terhadap kesalahan pencatatan maupun potensi kecurangan, sehingga mekanisme kontrol internal menjadi lebih kuat dan efektif. Secara keseluruhan, penelitian dalam artikel ini membuktikan bahwa penerapan basis akrual tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan di yayasan dan sektor publik lainnya, tetapi juga memperkuat

akuntabilitas lembaga, mempercepat proses pelaporan, serta membangun kepercayaan pemerintah, donatur, dan masyarakat luas terhadap pengelolaan dana publik.

Artikel 2

1. Judul Artikel : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik
2. Analisis :

Pelaporan keuangan sektor publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan menuntut tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Meskipun reformasi akuntansi yang meniru sektor swasta telah didorong, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas politik, kapasitas ekonomi, serta infrastruktur administratif yang berbeda di tiap negara, terutama di negara berkembang. Standar internasional seperti IPSAS dan GAAP telah membantu memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penyesuaian budaya organisasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disajikan.

Analisis bibliometrik dalam artikel ini memetakan tren dan kesenjangan penelitian pelaporan keuangan sektor publik, menyoroti fokus yang makin berkembang dari pelaporan dasar menuju isu tata kelola, etika, dan pemberantasan korupsi. Hasil studi menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik dan kepercayaan publik yang meningkat, sekaligus menurunkan tingkat korupsi.

Artikel 3

1. Judul Artikel : Akuntansi Sektor Publik: Definisi, Tujuan, Jenis, & Prospeknya
2. Link : <https://www.cakrawala.ac.id/blog/akuntansi-sektor-publik>
3. Analisis :

Akuntansi sektor publik menegaskan bahwa bidang ini tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga memiliki peran penting dalam memastikan dana publik dikelola dengan transparan dan akuntabel. Akuntansi sektor publik menjadi alat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, terutama karena dana yang digunakan berasal dari pajak, hibah, dan partisipasi publik. Melalui sistem pencatatan yang mengikuti standar pemerintah seperti SAP, setiap laporan keuangan disusun agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Selain menegaskan fungsi akuntansi sektor publik, dalam artikel ini juga menunjukkan bagaimana karakteristik laporan keuangan pemerintah berbeda dengan sektor swasta.

Fokus utama laporan sektor publik bukan untuk menunjukkan profit, melainkan menilai seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai tujuan pelayanan masyarakat. Berbagai jenis laporan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, hingga CALK, memberikan gambaran lengkap terkait kinerja keuangan pemerintah serta bagaimana anggaran dijalankan. Perbedaan tujuan, sumber dana, standar pencatatan, dan orientasi akuntabilitas menjadi pembeda utama antara akuntansi sektor publik dan swasta.

Dari pembahasan terakhir, terlihat bahwa perkembangan akuntansi sektor publik membuka peluang kerja yang luas di bidang pemerintahan maupun lembaga audit profesional. Kebutuhan akan akuntan, auditor, konsultan pajak, hingga akuntan forensik semakin besar seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan pengawasan anggaran publik. Prospek kerja ini menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik bukan hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mencegah penyelewengan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Analisis Jurnal Nasional

Analisis Jurnal 1

1. Judul Jurnal : Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
2. Link : <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/106>
3. Analisis :

Jurnal ini membahas bagaimana perkembangan dan kondisi akuntansi sektor publik di Indonesia, dengan fokus pada perannya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah.

Jurnal menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik sangat penting karena mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan negara/daerah agar informasi yang dihasilkan relevan untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kepada publik. Perkembangan penting terjadi sejak UU Keuangan Negara dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang bertujuan memberi gambaran lebih akurat tentang posisi keuangan pemerintah dan mendukung tata kelola yang baik. Meski regulasi sudah maju, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai masalah seperti kasus korupsi, lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM akuntansi publik, infrastruktur TI yang belum merata, serta resistensi terhadap perubahan. Ada juga kritik bahwa akuntansi publik terlalu meniru konsep Barat dan sering hanya fokus pada angka rupiah, bukan nilai sosial atau budaya yang lebih luas. Penelitian menegaskan bahwa akuntansi sektor publik tetap dibutuhkan dan terbukti dapat mendukung kinerja organisasi, misalnya di sektor layanan kesehatan. Ditekankan bahwa perlunya kolaborasi akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat agar kesenjangan antara konsep dan implementasi bisa dipersempit, sehingga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik semakin kuat.

Analisis Jurnal 2

1. Judul Jurnal : Studi Literatur: Implementasi Teori Akuntansi Pada Laporan Keuangan Sektor Publik
2. Link : <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.100>
3. Analisis :

Jurnal ini membahas pentingnya penerapan teori akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik, dengan fokus pada bagaimana teori membantu meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan pemerintah. Artikel menjelaskan

bahwa teori akuntansi adalah kumpulan konsep dan prinsip yang menjelaskan fenomena akuntansi serta hubungan antar variabel dalam struktur akuntansi, baik dalam bentuk teori normatif (apa yang seharusnya) maupun teori positif (apa yang terjadi). Beberapa teori yang dibahas antara lain teori kepemilikan, teori entitas, dan teori dana, yang masing-masing memengaruhi cara menyajikan dan menafsir laporan keuangan sektor publik.

Kendala utama dalam akuntansi sektor publik yaitu masalah objektivitas, konsistensi, daya banding, ketepatan waktu, biaya penyajian laporan, dan materialitas, yang semuanya dapat mengurangi kualitas informasi jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kesulitan mengadopsi standar seperti SAP berbasis akrual secara penuh.

Implementasi teori akuntansi dan standar yang baik membuat laporan keuangan lebih berkualitas, meningkatkan kinerja keuangan, mendukung tata kelola yang baik, dan memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik yang diterapkan dengan benar berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Analisis Jurnal 3

1. Judul Jurnal : Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
2. Link: <https://greenationpublisher.org/index.php/JGIA/article/view/467>
3. Analisis :

Jurnal ini meneliti penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, serta perbedaan kualitas pelaporan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama penelitian adalah menilai sejauh mana sistem akuntansi sektor publik (terutama basis akrual dan SAP) mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi faktor yang membuat implementasinya berhasil atau gagal. Penelitian juga ingin menghubungkan praktik di lapangan dengan teori New Public Management dan Institutional Theory dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan studi sistematis dan analisis deskriptif-komparatif. Data diambil dari 5 instansi pusat dan 15 pemerintah daerah (2018–2023) melalui analisis laporan keuangan dan audit BPK, observasi sistem seperti SIKD dan e-budgeting, serta wawancara pejabat akuntansi dan auditor.

Hasil menunjukkan penerapan akuntansi akrual cukup tinggi dan meningkatkan kualitas laporan serta jumlah opini WTP, tetapi masih ada entitas yang mendapat WDP dan Tidak Wajar. Transparansi daring laporan dan realisasi anggaran meningkat, namun bervariasi; pusat umumnya jauh lebih patuh dan terbuka dibanding banyak pemerintah daerah.

Kendala utama adalah keterbatasan SDM akuntansi, infrastruktur sistem informasi, ketidakefektifan pemanfaatan aplikasi, dan perbedaan komitmen pimpinan terhadap keterbukaan. Tekanan institusional dari BPK dan Kementerian Keuangan mendorong kepatuhan, tetapi kadang hanya formalistik jika tidak didukung budaya akuntabilitas dan pengawasan internal yang kuat.

Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi akuntansi publik di Indonesia maju signifikan, tetapi belum merata karena kesenjangan kapasitas dan komitmen antar daerah. Rekomendasi utamanya adalah penguatan pelatihan SDM, digitalisasi yang merata, penguatan audit internal, dan kebijakan yang mendorong budaya transparansi, sehingga akuntansi sektor publik benar-benar mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi kinerja.

Analisis Jurnal Internasional

Jurnal Internasional 1

1. Judul Jurnal : The Role Of IPSAS In Controlling Corruption Of Emerging Country : Study In Indonesia.
2. Analisis :

Dalam Jurnal membahas isu korupsi yang menjadi hambatan utama bagi pembangunan, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Berdasarkan data Transparency International tahun 2023, Indonesia berada pada posisi ke-115 dengan skor indeks persepsi korupsi (CPI) sebesar 34/100. Fenomena korupsi ini tidak hanya merugikan sisi ekonomi, tetapi juga secara signifikan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Korupsi banyak terjadi di berbagai tingkat lembaga publik, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, hingga kementerian, dengan kasus PT ANTAM pada tahun 2024 sebagai contoh konkret yang menimbulkan kerugian besar sekaligus menggoyahkan kredibilitas lembaga terkait.

Dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan sektor publik, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) hadir sebagai standar akuntansi internasional yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. IPSAS memungkinkan laporan keuangan yang lebih rinci dan terbuka, yang menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Penggunaan IPSAS dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga menekan praktik korupsi. Misalnya, penelitian Gebreyesus (2021) mengindikasikan bahwa IPSAS memandu pengambilan keputusan terkait distribusi sumber daya dengan lebih efisien, sementara temuan Hamed-Sidhom (2022) mencatat penurunan korupsi di negara penerima bantuan lewat peningkatan transparansi berkat IPSAS.

Namun, pengadopsian IPSAS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Tenaga kerja di sektor publik masih minim kompetensi untuk mengoperasikan standar akuntansi berbasis akrual. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya mendukung karena sistem akuntansi yang digunakan belum terintegrasi secara optimal. Faktor lain adalah tingginya biaya yang diperlukan untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi dalam proses transisi.

Manfaat yang diharapkan dari penerapan IPSAS cukup signifikan, meliputi peningkatan transparansi kepada publik, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan yang berbasis data akuntansi yang akurat. Selain itu, laporan

keuangan yang lebih jujur dan terbuka dapat mengurangi ruang bagi korupsi dan manipulasi. IPSAS juga memberikan keuntungan di level global dengan mempermudah perbandingan pengelolaan keuangan antar negara.

Secara keseluruhan, penerapan IPSAS di Indonesia adalah langkah strategis yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan menekan korupsi apabila hambatan-hambatan implementasi dapat diatasi. Keberhasilan reformasi ini memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi yang memadai, serta adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk mendorong standar pelaporan berdasarkan IPSAS. Dengan pelaksanaan yang tepat, IPSAS dapat menjadi instrumen penting dalam mengembalikan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Jurnal Internasional 2

1. Judul Jurnal : Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting.

2. Analisis :

Jurnal ini membahas bagaimana akuntansi sektor publik bisa membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui metode *Systematic Literature Review*, penulis menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dan standar internasional seperti IPSAS membuat laporan keuangan pemerintah jadi lebih jelas dan mudah dipahami. Artinya, laporan keuangan tidak hanya jadi formalitas atau laporan tahunan, tetapi juga menjadi bukti bahwa pemerintah mengelola uang publik secara terbuka dan profesional .

Dari hasil kajian, terlihat bahwa transparansi dan akuntabilitas punya hubungan kuat dan saling mendukung. Ketika pemerintah membuka data keuangannya dengan jelas, masyarakat dan lembaga pengawas memiliki landasan yang objektif untuk menilai kinerja pemerintah. Transparansi ini kemudian mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab, karena apa yang dilakukan bisa dilihat dan dievaluasi secara langsung oleh publik.

Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak bisa muncul hanya karena laporan keuangan dipublikasikan. Kepercayaan akan terbentuk kalau transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan secara konsisten dan dapat dimengerti masyarakat. Karena itu, reformasi akuntansi publik perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah, pengawasan yang kuat, dan literasi

masyarakat agar laporan yang transparan tidak hanya jadi dokumen teknis yang sulit dipahami. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya sebatas teori, tapi benar-benar membangun kepercayaan masyarakat secara nyata.

Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Judul : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Tahun Anggaran 2022
2. Link: <https://ppid.mojokertokota.go.id/userfiles/2023/04/b53dbf698a29b0672432bfe987c65d8a.pdf>
3. Analisis :

Secara umum, kinerja keuangan Bappeda Litbang Kota Mojokerto tahun 2022 membaik dari sisi pelaksanaan anggaran, tetapi posisi kekayaan bersih (ekuitas) menurun dibanding 2021. Realisasi belanja 2022 sebesar Rp12.796.393.123,58, naik sekitar Rp13,24 juta atau 0,10% dibanding realisasi 2021 sebesar Rp12.783.155.792,35, dengan tingkat serapan 97,79% terhadap anggaran 2022 Rp13.085.082.607,00. Belanja operasi (pegawai dan barang/jasa) juga naik dari Rp11,98 miliar (2021) menjadi Rp12,64 miliar (2022), mencerminkan aktivitas yang lebih besar, terutama kenaikan beban pegawai dan perjalanan dinas. Ekuitas akhir turun dari Rp4.115.531.304,03 (2021) menjadi Rp3.968.940.817,12 (2022) karena defisit LO dan koreksi/mutasi aset, meskipun terdapat penambahan aset tetap seperti peralatan dan gedung. Nilai buku aset tetap turun dari Rp4.098.756.887,03 (2021) menjadi Rp3.966.565.317,12 (2022) terutama akibat penyusutan dan penghapusan aset, walaupun ada belanja modal dan mutasi masuk peralatan serta penambahan nilai gedung.

Belanja modal justru menurun cukup signifikan dari Rp183.748.000,00 (2021) menjadi Rp159.587.480,00 (2022), sehingga proporsi belanja lebih banyak untuk operasi dibanding investasi aset baru. Beban operasional LO naik tipis sekitar 2,02% (dari Rp12,71 miliar menjadi Rp12,97 miliar), dengan kenaikan terbesar pada beban pegawai dan perjalanan dinas, sementara beban persediaan dan jasa menurun. Dari sisi penyerapan anggaran dan pencapaian output program, kinerja 2022 dapat dikatakan baik dan sedikit meningkat dibanding 2021, terlihat dari realisasi yang tinggi serta kenaikan kecil total belanja. Namun dari perspektif kesehatan neraca, ekuitas dan nilai buku aset tetap menurun, sehingga perbaikan lebih diperlukan pada sisi penguatan aset dan pengelolaan defisit LO agar posisi keuangan jangka panjang lebih kuat.

REFERENSI

- Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*. 2(6), 725-729. DOI : <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6>
- Handayani, A., Maulana, J., Lubis, P, K, D. (2024). Studi Literatur: Implementasi Teori Akuntansi Pada Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP)*. 1(2), 114-123. DOI : <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.100>
- Hendriarto, P., Sangapan, L, H., Paryanti, A, B., Manurung, A, H., Manurung, A. (2025). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*. 3(2), 59-69. DOI : <https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2>
- Sakinah, A.N., Haliah, H., & Kusumawati, A. 2024. *The Role Of IPSAS In Controlling Corruption Of Emerging Country : Study In Indonesia*. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*.
- Siahay, A. Z. D. (2023). *Building public trust through transparency and accountability: A systematic review of the role of public sector accounting*. *Jurnal Economic Resource*, 6(2), 420–438.